



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI ENDAH YUNIASTUTI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **264662**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.275.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/80 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/50 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
7. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 169.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



4. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
5. MOTOR, HONDA JFX1E325833 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 141.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.376.364

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.590.876.364

III. HUTANG Rp. 102.218.041

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.488.658.323

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.